



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUTARYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **676286**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **2.521.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m<sup>2</sup>/112 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 1.550.000.000
2. Tanah Seluas 177 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 250.050.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m<sup>2</sup>/122 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
4. Tanah Seluas 140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 98 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 3800 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **45.000.000**

1. MOTOR, HONDA WW150EXJ 2IN A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX150F VARIAN 1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **----**

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **145.568.741**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	2.771.618.741
III. HUTANG	Rp.	91.003.120
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.680.615.621

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.